



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2016**

Nama Unit	:	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
Tugas Pokok	:	Melaksanakan pengendalian kegiatan seksi fasilitasi usaha dan kelembagaan, menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek fasilitasi usaha dan kelembagaan serta membantu kepala bidang pengembangan usaha melaksanakan dan memfasilitasi aspek fasilitasi usaha dan kelembagaan.
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian aspek fasilitasi usaha dan kelembagaan.2. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Seksi Fasilitasi usaha dan Kelembagaan.3. Pelaksanaan dan fasilitasi aspek fasilitasi usaha dan kelembagaan.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kinerja sumber daya dan kelembagaan peternakan	1.1 Jumlah kelembagaan peternakan yang mampu mendorong produktivitas dan iklim usaha (kelompok)	Kelembagaan Peternakan adalah Lembaga yang ada di dalam masyarakat atau lembaga yang tumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk peternak yang tumbuh berdasarkan kesamaan kepentingan dalam menangani dan mengembangkan Usaha agribisnis peternakan secara formal, terorganisir dan mempunyai legalitas guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan peternak, dalam bentuk kelompok peternak, asosiasi dan korporasi.	Kabupaten/Kota se Jawa Barat	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
		1.1.1 Jumlah kelompok tani ternak yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional (kelompok)	Kelompok Tani Ternak adalah kumpulan petani ternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, ditunjukkan dengan adanya administrasi kelompok. Kelompok yang dimaksud telah dikukuhkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.	Kabupaten/Kota se Jawa Barat	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
		1.1.2 Jumlah stakeholder yang menyepakati manajemen kelembagaan tani ternak (stakeholder)	Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang terdiri dari kalangan bisnis/usaha (pelaku usaha), Masyarakat dan pemerintah	Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
		1.1.3 Jumlah dokumen updating kelembagaan peternakan (dokumen)	dokumen updating merupakan satu kesatuan informasi berkenaan dengan perkembangan data kelembagaan peternakan.	Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
2	Meningkatnya Usaha Peternakan yang Ekonomis	2.1. Jumlah pelaku usaha yang mampu mengakses fasilitas usaha (orang)	Pelaku Usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia, Kelompok, Gabungan kelompok (gapok) atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha.	Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
		2.1.1. Jumlah kabupaten/kota yang dapat mengakses sumber-sumber permodalan di bidang peternakan (kabupaten/kota)	Salah satu aspek pendukung bergerak nya usaha agribisnis tersebut adalah adanya dukungan Permodalan. sumber-sumber permodalan di bidang peternakan adalah kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan di Daerah	Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
		2.1.2 Jumlah dokumen kajian fasilitasi usaha peternakan	Dokumen kajian merupakan laporan hasil belanja konsultasi terkait dengan isu-isu tertentu pada seksi fasilitasi usaha dan kelembagaan	Kabupaten/Kota Se Jawa Barat	Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan

KEPALA SEKSI FASILITASI USAHA DAN KELEMBAGAAN

Ir. PIPIN WIDANINGRUM

Penata Tk. I

NIP. 19620429 198903 2 002